

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
 Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan
 dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
 Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan
 Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah
 Kabupaten tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
 Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
 Tangga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur;

- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
- 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan
- 10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Jakstarada Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jakstarada Kabupaten; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan Jakstarada Kabupaten yang sistematis dan terkoordinasi.

BAB III ARAH JAKSTRADA KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Jakstrada Kabupaten memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga Strategi, Target, dan Program Kabupaten Pasal 5

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam penguranganSampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. pengutan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :

- a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah Kabupaten.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk Laporan Jakstrada sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Terhadap Laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sampit, pada tanggal 11 Desember 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KOTIM

NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H NIP 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur

INDIKATOR				TAF	IUN			
INDIRATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	89.903	91.971	94.087	96.251	98.464	100.729	103.046	105.416
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	16.183	18.394	20.699	23.100	25.601	27.197	28.853	31.635

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur

INDIKATOR				TAF	IUN			
INDIRATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	89.903	91.971	94.087	96.251	98.464	100.729	103.046	105.416
Target Peanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	65.630	73.577	70.565	71.225	71.875	72.525	73.162	73.791

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KOTIM

NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H NIP 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 – 2025

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAF	IUN				SEKTOR	SEKTOR
NO.	KEDIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga	Dokumen /Tahun	-	1		-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /Tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAF	HUN				SEKTOR	SEKTOR
NO.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /Tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /Tahun									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga	Disesuai	kan den	gan pere	ncanaar	n dan ke	mampu	an keua:	ngan da	erah	Pemerintah Kabupaten	DPRD Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAF					SEKTOR	SEKTOR
110.	KEDIO/IK/IIV	Simulibai		SHIOHN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d. Peningkatan	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di Tingkat daerah	Pertemuan /tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Pusat	K/L	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pedagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Kawasan

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAF	HUN				SEKTOR	SEKTOR
NO.	KEDIOAKAN	SIAKAIEGI	TROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
														Permukiman
			b) Pemerintah	Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas	Dinas PUPR,
			Provinsi										Lingkungan	Dinas
													Hidup	Pedagangan
														dan
														Perindustrian,
														Dinas Koperasi
														dan UMKM,
														Dinas
														Perumahan
														dan Kawasan
														Permukiman,
														Pemerintah
														Kabupaten
			c) DPRD	Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas	Dinas PUPR,
			Kabupaten										Lingkungan	Dinas
													Hidup	Pedagangan
														dan
														Perindustrian,
														Dinas Koperasi
														dan UMKM,
														Dinas
														Perumahan
														dan Kawasan
														Permukiman,
														Pemerintah
			2) Pelaksanaan	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas	Kabupaten Dinas PUPR,
			training of trainers	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1		· ·
			pengurangan										Lingkungan Hidup	Dinas Pedagangan
			Sampah Rumah										піцир	dan
			Tangga dan											Perindustrian,
			Sampah Sejenis											
			Sampah Rumah											Dinas Koperasi

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	2010			TAF					SEKTOR	SEKTOR
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan/ Kelurahan											dan UMKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten
			3) Pembentukan bank sampah induk di Kecamatan	Kecamatan	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan Jejaring nasional data operasional Bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Kabupaten	Kecamatan	-	1	1	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pedagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah

TA T	IZDDI IAIZANI	OTA DATE OF	DDOODAM	C A /TNI I A NI				TAH	IUN				SEKTOR	SEKTOR
No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
														Kabupaten
			2) Pengembangan	Kecamatan									Pemerintah	Dinas
			kegiatan										Kabupaten	Lingkungan
			pendauran ulang										1	Hidup, Dinas
			dan pemanfaatan											Perdagangan
			kembali Sampah Rumah Tangga											dan
			dan Sampah											Perindustrian,
			Sejenis Sampah											Dinas PUPR,
			Rumah Tangga											Dinas
			skala rumah											Pendidikan,
			tangga dan skala											Dinas
			permukiman berbasis											Komunikasi
			masyarakat											dan
														Informatika,
														Dinas Sosial,
														Pemerintah
														Kabupaten
			3) Pengembangan	Kecamatan									Pemerintah	Dinas
			kegiatan pendauran ulang										Kabupaten	Lingkungan
			dan pemanfaatan											Hidup, Dinas
			kembali Sampah											Perdagangan
			Rumah Tangga											dan
			dan Sampah											Perindustrian,
			Sejenis Sampah											Dinas PUPR,
			Rumah Tangga skala rumah											Dinas
			tangga dan skala											Pendidikan,
			permukiman											Dinas
			berbasis kawasan											Komunikasi
														dan
														Informatika,
														Dinas Sosial,
														Pemerintah
														Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAI	IUN				SEKTOR	SEKTOR
110.	REDIOTRAIN	Simonibai	TROGRAM	SHIOHN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan	1	2	2	2	2	2	2	2	Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR 2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan	Unit/Tahun Kelompok orang/Bank Sampah/ Tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperfasi dan UMKM Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAL	HUN				SEKTOR	SEKTOR
NO.	REDIOARAN	STAKATEGI	I ROGRAW	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			3) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (beyond compliance)	Kawasan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen / Tahun									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten, Manufaktur, Ritel, Jasa Makanan dan Minuman

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAH	IUN				SEKTOR	SEKTOR
110.	KEDIOMKM	Simonizar	TROGRAM	SHIOHN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan NSPK	1) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (best available technology) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	2010	0040	2222		IUN		2021		SEKTOR	SEKTOR
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN					IUN		1	1	SEKTOR	SEKTOR
110.		omanzar			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			Sejenis Sampah											
	n		Rumah Tangga											
	1		e) Pemrosesan	Dokumen									Dinas	BPPT, BSN,
	,		akhir Sampah										Lingkungan	Pemerintah
	1		Rumah Tangga										Hidup, Dinas	Kabupaten
	1		dan Sampah										PUPR	1
	,		Sejenis Sampah											
	n		Rumah Tangga											
	1		5) Penyusunan dan											
	,		kaji ulang											
	1		prosedur											
	1		operasional standar											
	1													
	1		penanganan Sampah Rumah											
	1		Tangga dan											
	1		Sampah Sejenis											
	1		Sampah Rumah											
	1		Tangga,											
	1		meliputi :										D.	DDDW DGM
	1		a) Pemilahan	Dokumen									Dinas	BPPT, BSN,
	,		Sampah										Lingkungan	Pemerintah
	1		Rumah Tangga										Hidup, Dinas	Kabupaten
	,		dan Sampah										PUPR	
	1		Sejenis Sampah											
	1		Rumah Tangga											
	,		b) Pengumpulan	Dokumen									Dinas	BPPT, BSN,
			Sampah										Lingkungan	Pemerintah
	,		Rumah Tangga										Hidup, Dinas	Kabupaten
			dan Sampah										PUPR	-
	,		Sejenis Sampah											
	,		Rumah Tangga	D 1									D.	D.
	,		c) Pengangkutan	Dokumen									Dinas	Dinas
			Sampah										Lingkungan	Perhubungan,
	,		Rumah Tangga										Hidup, Dinas	BPPT, BSN,
	,		dan Sampah Sejenis Sampah										PUPR	Pemerintah
			Rumah Tangga											Kabupaten
			Kuman rangga									<u> </u>		_

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAH					SEKTOR	SEKTOR
110.	ILEBIOTHE III	omandar	TROGRAM	SHIGHT	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten
			6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN,

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAH					SEKTOR	SEKTOR
110.	TEDIOTHE IIV	omanda		OHI OHIV	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
	1		Sejenis Sampah											Pemerintah
	I		Rumah Tangga											Kabupaten
	I		d) Pengolahan	Dokumen									Dinas	Dinas PUPR,
	I		Sampah										Lingkungan	BPPT, BSN,
	l		Rumah Tangga										Hidup	Pemerintah
	l		dan Sampah Sejenis Sampah											Kabupaten
	I		Rumah Tangga											
	1		e) Pemrosesan	Dokumen									Dinas	Dinas PUPR,
	ĺ		akhir Sampah										Lingkungan	BPPT, BSN,
	ĺ		Rumah Tangga										Hidup	Pemerintah
	ĺ		dan Sampah										-	Kabupaten
	I		Sejenis Sampah Rumah Tangga											-
	1	b. Penguatan	1) Penyusunan											
	ĺ	koordinasi dan	keputusan											
	I	kerja sama	bersama mengenai											
	I	antara Pemerintah	koordinasi penanganan											
	ĺ	Pusat dengan	Sampah Rumah											
	I	Pemerintah	Tangga dan											
	I	Daerah	Sampah Sejenis											
	ĺ		Sampah Rumah											
	ĺ		Tangga dalam :	D 1									Pemerintah	Badan
	I		a) Penyediaan lahan	Dokumen									Kabupaten	Pendapatan
	ĺ		lanan											Daerah, Dinas
	I													Lingkungan
	I													Hidup, Dinas
	I													PUPR, Dinas
	I													Perumahan
	I													dan Kawasan
	I													Permukiman
	I		b) Pembinaan	Dokumen									Dinas	Dinas Sosial,
	I		pemulung										Lingkungan	Dinas
	1												Hidup	Kesehatan,

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAF					SEKTOR	SEKTOR
110.	REDIGITATIV	Simulibal	T ROGIUM	OHIO/III	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
														Dinas Tenaga
														Kerja dan
														Transmigrasi,
														Badan
														Pendapatan
														Daerah, Dinas
														Koperasi dan
														UMKM, Dinas
														PUPR,
														Pemerintah
														Kabupaten
			c) Anggaran	Disesuaikaı	ı dengan	n perenca	anaan d	an kema	ımpuan	 Pemerin	tah Dae	rah	Pemerintah	Dinas
			penanganan		Ü	•			•				Kabupaten	Lingkungan
			Sampah										1	Hidup, Dinas
			Rumah Tangga											PUPR, Badan
			dan Sampah											Pendapatan
			Sejenis Sampah											Daerah
			Rumah Tangga yang meliputi											Dacran
			pemilahan,											
			pengumpulan,											
			pengangkutan,											
			pengolahan,											
			dan											
			pemrosesan											
			akhir		1							Т		
			d) Teknologi	Dokumen									Dinas	Dinas
			Penanganan										Lingkungan	Pendidikan
			Sampah										Hidup, Dinas	
			Rumah Tangga dan Sampah										PUPR, BPPT	
			Sejenis Sampah											
			Rumah Tangga											
			yang meliputi											
			pemilahan,											
			pengumpulan,											
			pengangkutan,											

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN					HUN	1	1	1	SEKTOR	SEKTOR
1.0.	112210111111	Jimuiizai	1 110 GIG IVI		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit									Pemerintah Kabupaten	Dinas PUPR
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah	Pertemuan /tahun									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	DPRD, Pemerintah Kabupaten
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kabupaten										Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN		1		TAH					SEKTOR	SEKTOR
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan Jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan										Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	dengan SILH di Kabupaten 1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat											PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAH					SEKTOR	SEKTOR
110.	TIEBIOTHE IIV	omandar	TROGRAM	SHIGHT	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup	dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun									Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN		v		TAF				v	SEKTOR	SEKTOR
110.	REDIOTIVITY	Simulibul	1 ROGIGIWI	5/110/110	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
														Pemerintah
														Kabupaten
			b) Kawasan	Kabupaten									Dinas PUPR,	Dinas PUPR,
			(TPS3R)										Dinas	Dinas
													Lingkungan	Lingkungan
													Hidup,	Hidup, Dinas
													Pemerintah	Perdagangan
													Kabupaten	dan
														Perindustrian
														Pemerintah
														Kabupaten
		g. Penerapan dan	Peningkatan peran	Pelaku									Dinas	Badan
		pengembangan	pelaku usaha	Usaha									Lingkungan	Pendapatan
		skema	melalui tanggung										Hidup	Daerah, Dinas
		investasi,	jawab sosial dan											Sosial, Dinas
		operasional, dan	lingkungan untuk penanganan											PUPR, dan
		pemeliharaan	Sampah Rumah											pelaku usaha
		pomomaan	Tangga dan Sampah											
			Sejenis Sampah											
			Rumah Tangga											
		h. Penguatan	1) Peningkatan	orang									Dinas	Dinas
		penegakan	kapasitas aparat										Lingkungan	Perhubungan,
		hukum	penegak hukum dalam										Hidup,	Kepolisian,
			penanganan										Pemerintah	Kejaksaan
			Sampah Rumah										Kabupaten	
			Tangga dan											
			Sampah Sejenis											
			Sampah Rumah											
			Tangga antara lain											
			Penyidik Pegawai											
			Negeri Sipil, Pejabat Pengawas											
			Lingkungan											
			Hidup, Satuan											
			Polisi Pamong											

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAH	HUN				SEKTOR	SEKTOR
NO.	REDIOARAN	SIMMIEGI	TROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			Praja, Jaksa, Polisi,Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup	Kemenkum HAM, Kemendagri, Kepolisian, Kejaksaan
		i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulian, pengangkutan, pengolahan, dan	Kabupaten									Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Kepolisian, Kejaksaan, BKPM, Pemerintah Daerah

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAH					SEKTOR	SEKTOR
110.	REBIOTHERIT	Omidiibai	T ROGIUM	S71107IIV	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			pemrosesan akhir di kabupaten											
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT	Dinas Komunikasi dan Informatika, LIPI, Pemerintah Kabupaten
				Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	DPRD, Pemerintah Kabupaten
			3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, BPPT, Pemerintah Kabupaten
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAF					SEKTOR	SEKTOR
1.0.	112210111111		1110 014 11/1	5111 0111	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
		dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											Pemerintah Kabupaten
			penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Kelurahan/Desa yang tidak melakukan penanganan berbasis masyarakat 4) Pembentukan dan	Kabupaten Kawasan									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten Dinas	Pemerintah Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAH	IUN				SEKTOR	SEKTOR
NO.	KEDIJAKAN	STARATEGI	FROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan										Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten	Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM
				Kawasan									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten	Pengelolan Kawasan Permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Tahun :

Nama Kabupaten:

I. Format Laporan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Capaian	Hambatan	Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

Untuk pengisian tabel di atas :

- 1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
- 2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai Kebijakan dan Strategi yang ada di dalam Lampiran II;
- 3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Contoh : penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Tentang Pengurangan Sampah Plastik;
- 4. Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- 5. Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- 6. Kolom (7) diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlaksananya target dalam kolom (5);
- 7. Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara penyelesaian dari hambatan dalam kolom (7).

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Target		Capaian		
	muikatoi	ton	%	ton	%	
1	Timbulan Sampah					
2	Pengurangan					
3	Penanganan					

Keterangan:

Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penangan sampah di Kabupaten.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KOTIM

NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H NIP 19780601 200604 1 004